

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI
KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU
DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur



Oleh:

ABI ANGGORO JATI

0771010095

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI
KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU
DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS

Disusun Oleh:

ABI ANGGORO JATI
NPM. 0771010095

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Haryo Sulistyantoro. SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Mas Anienda. TF.,SH.,MH
NPT. 377709070223

Mengetahui,

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.SH,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS

Oleh:

ABI ANGGORO JATI
NPM. 0771010095

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada Tanggal
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Haryo Sulistiyantoro., SH. MM.
NIP 19601212 198803 1 001

Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Mas Anienda. TF., SH.. MH
NPT 37709070223

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP 19620625 199103 1 001
3.

Subani.SH.,M.Si
NIP 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI
KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU
DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS

Oleh:

ABI ANGGORO JATI
NPM 0771010095

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Pada tanggal
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Haryo Sulistyantoro., SH. MM.
NIP 19601212 198803 1 001

Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Mas Anienda. TF., SH.. MH
NPT 37709070223

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP 19620625 199103 1 001
3.

Subani.SH.,M.Si
NIP 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abi Anggoro Jati

Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 9 September 1988

NPM : 0771010095

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Jln. Basuki Rachmad No.88 Dipan Utara, Tanjung Anom,
Nganjuk

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Surabaya, Mei 2012

Penulis

Haryo Sulistyantoro, SH.,MM.

NIP. 19620625199031001

Abi Anggoro Jati

NPM. 0771010095

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS".

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Haryo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Sutrisno, SH., Mhum., selaku Wadep I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC. Gendut Soekarno, M.S., selaku Wadep II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan yang selalu memberikan bekal ilmu serta nasehatnya kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur .
5. Ibu Mas Anienda TF., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama mengerjakan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua Orang Tua, Priyono.,SP Bapakku dan Yunarlikah Ibuku, dan adek saya Cici Cahya Wijayanti yang telah membiayai dan selalu memberi semangat dan curahan kasih sayang tanpa henti.
9. Om saya, Yunarwoko yang telah membantu saya selama di Surabaya.
10. Teman – teman seperjuangan yang telah menjadi saudaraku selama kuliah di sini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Progam Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Abi Anggoro Jati

NPM : 0771010095

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 9 September 1988

Program Studi : Pidana

Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS

Abstraksi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan tata cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum antara lain yaitu demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam melakukan kegiatan demonstrasi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilaksanakan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan.

Rally or demonstration is part of the data democracy in a country because of the demonstration is one way to express their opinions in public. But sometimes demonstrations have become increasingly trending, and adverse public event such as the destruction of the crime and anarchism. This study uses a normative juridical research. Data processing method used is descriptive method with qualitative normative juridical approach that is reviewing the related literature, expert opinion and analysis of relevant case law in the documents to clarify the results of the study. This study aims to determine the forms and procedures in publicly expressing an opinion and to determine sanctions

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

for perpetrators who are anarchist demonstrations. Conclusions from this research are forms of expression in public, among others, the demonstrations, marches, rallies, and speeches in accordance with the provisions of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. In the first demonstration activities to be done is to permit the police about who will be the venue for the demonstration activities. Once all requirements are met then the demonstration demonstration activities can be carried out by the security police around. In the event of anarchy in the activities of the demonstration, then who is responsible for coordinating and conducting demonstration actors such tndakan anarchism. Sanctions imposed on perpetrators who are anarchist demonstrations are based on the Penal Code in accordance with a crime they did.

Kata Kunci : Demonstrasi, Anarkis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	x
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kajian Pustaka	12
1.5.1 Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi	12
1.5.2 Pengertian Anarki	14
1.6 Metodologi Penelitian	30
1.6.1 Jenis Penelitian	30
1.6.2 Data	31
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan dan/atau Data	31
1.6.4 Metode Pengolahan Data	32
1.6.5 Sistematika Penulisan	32

BAB II PENGATURAN DEMONSTRASI YANG ADA DI INDONESIA ...	34
2.1 Bentuk Pengaturan dan Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	34
2.2 Relevansi Antara Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan KUHP	43
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.....	48
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.....	48
3.2 Penerapan Sanksi.....	53
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:WAWANCARA DENGAN PETUGAS POLRESTA MOJOKERTO
LAMPIRAN II	:UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
LAMPIRAN III	:PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui, bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

- a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
- b. Syarat Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
- c. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
- d. Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, adil dan manusiawi.

- e. Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.

Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dijalankan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena memang hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Kalau hukum tersebut tidak terlaksana, maka hukum atau undang-undang itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum atau undang-undang yang demikian akan mati dengan sendirinya.

Tahun 2009 seharusnya dinisbatkan menjadi tahun pendidikan berpolitik bagi rakyat Indonesia, namun yang terjadi justru berbeda, sebab yang lebih terekam adalah tahun dimana terjadi carut-marut dalam dunia penegakan hukum. Alasannya sederhana, sederet peristiwa hukum secara berturut-turut menjadi potret buram di tengah-tengah pandangan masyarakat Indonesia. Mulai dari kisruh terjadinya ribuan sengketa

pemilihan umum, penjatuhan berbagai vonis pengadilan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil, hingga episode silang sengkaret kasus hukum “Bibit - Chandra”.

Tidak berhenti sampai disitu saja, terbukanya praktik terselubung mafia peradilan serta terungkapnya fenomena istana mewah dalam penjara, semakin menandakan ketidakberesan kondisi negara hukum Indonesia selama ini. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, sebagian besar rakyat nampak dipenuhi peluh rasa kecewa, pasalnya tuntutan atas pelaksanaan reformasi hukum yang telah digulirkan sejak 12 (dua belas) tahun silam belum memberikan perubahan yang signifikan bagi kelangsungan hidup mereka secara riil.

Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat (people distrust) terhadap lembaga negara yang ada sekarang ini, khususnya kepada aparat penegak hukum semakin menjadi-jadi. Demonstrasi demi demonstrasi terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sipil (civil society) atas kinerja pemerintahan baik pusat maupun di daerah.¹

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan long march, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini

¹ Pan Mohamad Faiz, Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat Terhadap Simbol-Simbol Negara, disampaikan dalam Focus Group Discussion LEMHANAS, 29-3-2010

melekat pada kata demonstrasi. Seharusnya demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi.

Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian, ketertiban memerlukan persamaan (equality), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan. Uraian diatas sekedar ingin menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidaklah sesederhana seperti acap kali didengung-dengungkan.

Sekedar konsep, sangat mudah mengucapkan keadilan dan ketertiban, tetapi pada tatanan operasional didapati bermacam-macam masalah yang dihadapi. Bahkan seperti disebutkan diatas, dapat terjadi pertentangan satu sama lain Rasa keadilan serta keinginan untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun dia berada. Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Penguasa ataupun Pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa juga di kategorikan sebagai Perang. Mengapa demikian ? Karena suatu perang itu timbul karena adanya bentrokan antara dua kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Dan juga yang menjadi “pihak” dalam perang itu bisa satu negara lawan negara, atau persekutuan negara-negara berhadapan dengan sekutu lainnya, akan tetapi bisa juga terjadi antara segerombolan manusia melawan gerombolan lainnya, seperti halnya dalam demonstrasi antara pihak yang berdemo melawan aparat penegak hukum atau polisi.²

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan long-march, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Seharusnya demonstrasi juga

² Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,hal.71

“mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi.

Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sepuluh tahun pula reformasi bergulir, demonstrasi masih menjadi pilihan beberapa pihak untuk menyuarakan kepentingan, ide, dan kritiknya. Demonstrasi sengketa hasil Pilkada, demonstrasi mahasiswa, aksi jahit mulut, hingga demonstrasi buruh terus mewarnai kehidupan demokrasi di negara ini. Cita-cita mulia reformasi, yang konon masyarakat adil dan makmur, tampaknya belum juga tercapai. Demonstrasi pun telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi

tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta penganiayaan atau anarkisme.

Contoh lain dari demonstrasi yang bersifat anarkis yaitu sekitar sepuluh ribu warga yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, terkait dengan penanganan insiden di Pelabuhan Sape mengamuk dan membakar Kantor Pemerintahan tersebut. Selain bangunan, sepeda motor dan kendaraan lainya yang berada di kompleks Kantor Bupati Bima juga dibakar oleh massa. Selain itu warga juga menutup jalan di Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Jalan diblokade karena warga kecewa dengan sikap Bupati Bima dan anggota Komisi III DPR yang tak juga mencabut SK Nomor 188 yang di permasalahan oleh warga.³

Dan contoh yang terbaru adalah, massa pendukung calon Bupati Mojokerto Dimiyati Rosyid (Gus Dim), melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada anarkisme. Kerusuhan terjadi saat di dalam gedung DPRD Mojokerto berlangsung sidang paripurna dengan agenda pemaparan visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati yang akan bertarung pada Pilkada 7 Juli 2010. Tiga pasang Cabub-Cawabub itu adalah Mustofa Kamal Pasha – Choiru Nisa (Manis), Suwandi – Wahyudi (Wasis), dan pasangan Khoirul Badik – Yasid Khohar (Koko). Ditengah jalannya sidang, tiba-tiba ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto (Arkam). Semula, mereka hanya berunjuk rasa di

³<http://m.liputan6.com/read/Kantor> Bupati Bima dibakar, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2012, Senin, 19.00

luar pagar gedung DPRD Mojokerto. Mereka mendesak Pilkada yang dijadwalkan pada tanggal 7 Juli tahun 2010 itu diundur. Alasannya, pasangan yang mereka usung yaitu Dimyanti Rosyid (Gus Dim) – M.Karel yang diusung Partai Hanura dinyatakan tidak lolos pencalonan. Gus Dim yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mojokerto dinyatakan tidak lolos tes kesehatan karena menderita penyakit multiorgan. Massa pendukung Gus Dim menuding keputusan KPU itu syarat rekayasa. Alasan kesehatan itu diklaim hanya sebagai upaya menjegal Gus Dim. Massa pendukung pasangan ini juga sudah beberapa kali berunjuk rasa di KPU Mojokerto. Bahkan sehari sebelum aksi anarkis itu, massa juga sempat berunjuk rasa untuk menagih janji para anggota dewan yang akan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait. Puncaknya, massa yang kecewa dengan sikap dewan itu kembali datang ke gedung dewan. Mereka berupaya masuk halaman gedung DPRD Mojokerto, namun dihadang oleh anggota polisi. Massa marah dan mengamuk, lalu melempari halaman gedung dengan bom molotov. Mereka merusak pagar serta menerobos barisan polisi yang berjaga di depan kantor dewan itu. Mereka merusak dan membakar kendaraan dinas maupun pribadi yang ada di sana dengan bom molotov yang tampaknya sudah disiapkan. Kebringasan massa itu dihentikan setelah polisi bertindak tegas dengan meringkus pelaku pembakaran dan pengrusakan.⁴

⁴<http://www.suarakarya-online.com/news.html>, diunduh tanggal 26 Maret 2012, Senin, 20.00

Berdasarkan uraian dan contoh-contoh diataslah saya selaku penulis menjadi tertarik untuk meneliti masalah demonstrasi anarkis ini. Apalagi sekarang ini tindakan tersebut sedang musim-musimnya. Terlalu gampang para pelaku demonstrasi berlaku anarkis seolah mereka tidak memikirkan apakah tindakan mereka tersebut dapat merugikan orang lain atau tidak. Mereka yang yang menyerukan perubahan tapi justru mereka sendiri yang tidak paham akan tindakan mereka yang harusnya perlu dirubah. Mereka yang menginginkan keadilan tapi justru mereka sendiri yang tidak adil pada orang-orang yang tidak tahu apa-apa malah menjadi sasaran dari kebrutalan dan ketidakpuasan mereka. Dimana sebenarnya arti demokrasi yang sesungguhnya? Apakah arti demokrasi itu adalah kebebasan mengeluarkan pendapat demi menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik itu berarti kebebasan untuk melakukan atau mengeluarkan pendapat dengan cara anarkisme juga. Pada waktu sekarang ini sudah jarang sekali orang yang bisa berfikir jernih dan dengan akal sehatnya. Terlalu gampang mereka diprovokasi, dimasuki dengan argumen-argumen atau kata-kata yang sebenarnya justru mengarah ke provokasi untuk melakukan anarkisme.

Adakah alasan sehingga mereka melakukan tindakan tersebut? faktor apakah yang menyebabkan para pendemo tersebut melakukan perbuatan anarkis seperti itu. Apakah pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas atau adakah aturan-aturan yang di keluarkan oleh pemerintah

untuk meminimalisir terjadinya tindakan anarkisme selama kegiatan demonstrasi itu berlangsung.

Lalu apa tanggungjawab mereka setelah melakukan anarkisme, merugikan orang yang justru tidak tahu apa-apa dengan maksud dan tujuan mereka. Dan apakah tindakan yang seperti ini yang harus dilakukan untuk menyuarakan suatu pendapat atau kekecewaan terhadap suatu lembaga atau seseorang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya selaku penulis ingin membahas dan menganalisis tentang persoalan ini. Oleh karena itulah saya memilih judul :

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI ANARKIS”

Dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan tentang demonstrasi di Indonesia
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku demonstrasi anarkis atas perbuatan yang telah mereka lakukan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk aturan-aturan dan tindakan Polisi dalam melaksanakan dan menanggulangi demonstrasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa.
- b. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berakhir anarki.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pembelajaran atau analisa bagi pemerintah atau instansi terkait untuk membuat aturan yang dimaksudkan untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan mengenai tindakan anarkisme tersebut.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Demonstrasi adalah bagian dari Negara demonstrasi dan juga wujud nyata kekecewaan masyarakat terhadap macetnya roda politik negeri ini.

Demonstrasi Didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran". Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Demonstrasi" berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). "Mendemonstrasi" berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.⁵

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga

⁵ Ibid,hal.178

dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakkan pembuat keputusan. Suatu demonstrasi haruslah bisa mengkomunikasikan pesannya melalui tema yang telah dibatasi secara jelas.

Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.

1.5.2 Pengertian Anarki

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Anarki" berarti hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara). Sedangkan "anarkis" artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki.⁶

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (diffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁷

Anarki adalah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan

⁶ Ibid,hal 157

⁷ Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan, hal. 11

hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

Jadi, Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan dimana di ikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

“Perbuatan” biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari pasal 338 KUHP.⁹

Selain itu anarkisme juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat. Dan tindakan seperti itu harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberikan ganjaran atau pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menjunjung tinggi hukum.¹⁰

Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu

⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 56

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 61

¹⁰ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jikalau tanpa otoritas politik. Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara moderen.¹¹

Namun, anarkisme sebagai suatu paham yang tidak menginginkan otoritas pemerintah dalam segala hal, mengalami pergeseran yang sangat jauh didalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada demonstrasi/unjuk rasa yang sering terjadi, dimana para demonstiran yang mempunyai tujuan agar aspirasinya di dengar oleh penguasa. Namun apabila keinginan para demonstiran tersebut tidak didengarkan oleh penguasa/pemerintah, "kaum anarkis" yang berada didalam kelompok demonstiran tersebut akan berpikir bahwa pemerintah tidak ada fungsinya, yang kemudian akan menggunakan cara-cara kekerasan misalnya pengrusakan atau penganiayaan sebagai ancaman kepada pemerintah agar aspirasi atau keinginan mereka didengar.

¹¹ <http://pustaka.otonomis.org/2006>, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2012, Senin, 19.00

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu demonstrasi menjadi anarki antara lain:

1. Keinginan pengunjuk rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi

Hal ini sering sekali terjadi pada saat terjadi unjuk rasa. Para demonstran yang pada umumnya mempunyai satu tujuan, menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi atau setidaknya didengar oleh pemegang kekuasaan dengan mengirimkan beberapa utusan dari demonstran untuk melakukan dialog dengan pemegang kekuasaan dan menemukan jalan keluar.

Namun apabila para pengunjuk rasa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah yang dapat berujung pada tindakan anarki.

Permasalahan yang cenderung membuat demonstrasi damai menjadi anarki, seperti diberitakan di beberapa media bahwa sering terjadi tindakan anarki oleh demonstran. Namun, jarang media yang mencoba mengungkapkan apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi seperti itu yaitu kebanyakan pemerintah tidak berani membuka dialog dan setidaknya mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh para demonstran.¹²

¹² <http://segalaartikel.blogspot.com/2008/06/adad.html>, terakhir diakses 6 Februari 2012, Senin, 19.00

2. Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan

Dari sudut yang lain, dapat kita amati bahwa adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (by chance) atau kecelakaan (by accident). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih parah.

Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal (base data) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, polisi laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru. Aparat kepolisian kerap di tuding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

3. Faktor kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan

Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan sebagai kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberi tahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjuk rasa.

4. Faktor pengamanan yang kurang

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung

jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, surat pemberitahuan tersebut memuat :

- a. Maksud dan tujuan
- b. Tempat, lokasi dan rute
- c. Waktu dan lama
- d. Penanggungjawab
- e. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- f. Bentuk
- g. Alat peraga yang digunakan
- h. Jumlah peserta

Pada huruf h diatas, tercantum syarat berapa jumlah pengunjung rasa yang akan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Suatu alasan yang sering muncul apabila pihak Kepolisian tidak mampu mengendalikan massa adalah dilihat sisi kuantitas, jumlah personel kepolisian sangat tidak memadai. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Menurut PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1 : 400. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Logikanya semakin kecil Rasio Polisi, semakin efektif pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar Rasio Polisi akan menyebabkan pengaduan

masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas patroli rendah, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara (quick response) tidak tepat waktu.

Semenjak dipisahkannya Polri dan TNI pada tahun 2000, Rasio Polisi Indonesia semakin membaik (mengecil). Jika pada akhir Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004 Rasio Polisi mencapai 1 : 750, maka sampai dengan akhir tahun 2008 Rasio Polisi telah mencapai 1 : 578. Diharapkan pada akhir tahun 2009, sasaran Rasio Polisi 1 : 500 dapat tercapai. Sayangnya, Rasio Polisi tersebut dibentuk berdasarkan pada jumlah total anggota polisi, bukan pada berapa banyak anggota polisi lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹³

Data tersebut diatas hanyalah perbandingan antara jumlah anggota. Kepolisian dengan masyarakat pada saat netral atau dengan kata lain bukan perbandingan pada saat adanya demonstrasi. Pada saat demonstrasi, jumlah anggota Kepolisian yang harus diturunkan untuk menjaga demonstrasi seharusnya lebih besar, karena kecenderungan terjadinya tindakan anarki pada saat demonstrasi juga lebih besar.

¹³ <http://gunarta.goen.goen.blogspot.com/2009/10/antara-rasio-polisi-dan-kinerja>, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2012, Senin, 19.00

5. Cara pikir para demonstran yang menyimpang

Para pelaku unjuk rasa (demonstran), melakukan tindakan anarki karena mereka salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka meyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan bahwa perilaku anarki yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mawadahi perbedaan.

6. Faktor psikologis

Mengenai perilaku kerumunan (crowd behavior), para ahli psikologi telah mengeksploitasi pendapat bahwa keanggotaan dalam kelompok besar menyebabkan individu-individu didalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih anti sosial di bandingkan ketika ia seorang diri.

Neil Smelser mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif , diantaranya :

1. Structural conduciveness: beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, seperti: pasar, tempat umum, tempat peribadatan, mall, dst.
2. Structural Strain: yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur. Misalnya: antar pendukung kontestan pilkada.
3. Generalized beliefs : share interpretation of event

4. Precipitating factors: ada kejadian pemicu (triggering incidence). Misalnya ada pencurian, ada kecelakaan, ada kebakaran.
5. Mobilization for actions: adanya mobilisasi massa. Misalnya : aksi buruh, rapat umum suatu ormas, dst.
6. Failure of Social Control – akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.¹⁴

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada enam faktor yang menjadi prasyarat terjadinya perilaku massa yakni :

1. Tekanan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, biaya hidup, dan pendidikan yang mahal.
2. Situasi yang kondusif untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum dan diliput media massa.
3. Adanya kepercayaan publik, dengan aksi massa situasi bisa diubah.
4. Peluang (sarana dan prasarana) untuk memobilisasi massa; (5) kontrol aparat yang lemah, dan
5. Faktor keyakinan publik, yang jarang tergoyah.
6. Kontrol aparat yang lemah.¹⁵

Keenam faktor ini menjadi faktor-faktor yang juga turut membentuk sifat irasional, emosional, impulsif, agresif, dan destruktif pada diri seseorang. Berbeda dengan kelompok demonstran. Kelompok ini cukup tergoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu potensial sedikit berbeda dari perusuh. Artinya, potensi pemicu itu bisa bertahan secara temporer, tetapi juga bisa permanen. Karena itu mengapa konflik sosial selalu langgeng, dan bahkan sekali waktu bisa muncul lagi.

¹⁴ <http://suryanto.blog.unair.ac.id/2008/12/03/memahami-psikologi-massa-dan-penanganannya>, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2012, Senin, 19.00

¹⁵ <http://kutikata.blogspot.com/2008/12/psikologi-massa.html>, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2012, Senin, 19.00

Ada empat teori yang seringkali digunakan untuk menjelaskan kejadian perilaku massa, yaitu :

1. Social Contagion Theory (Teori Penularan sosial) menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial massa. mereka melakukan tindakan meniru/ imitasi.
2. Emergence Norm Theory: menyatakan bahwa perilaku didasari oleh norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Bila norma ini dipandang sesuai dengan keyakinannya, dan berseberangan dengan nilai/ norma aparat yang bertugas, maka konflik horizontal akan terjadi.
3. Convergency Theory: menyatakan bahwa kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian dimana ketika mereka berbagi (convergence) pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian. Orang akan berkumpul bila mereka memiliki minat yang sama dan mereka akan terpenggil untuk berpartisipasi.
4. Deindividuation Theory, menyatakan bahwa ketika orang dalam kerumunan, maka mereka akan "menghilangkan" jati dirinya, dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa.¹⁶

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/ anggapan/ perasaan bersama (collective belief). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini "pantas" untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

¹⁶ <http://suryanto.blog.unair.ac.id/2008/12/03/memahami-psikologi-massa-dan-penanganannya>, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2012, Senin, 19.00

7. Adanya Provokasi

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi.

Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap. Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikut mengemukakan hal yang sama.

Mengenai bayangan itu, diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya. Yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsiniasi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, tak ayal, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

8. Adanya Kelompok Terorganisir

Anarki, sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan, sepanjang diupayakan, dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian, memang relatif lebih mudah memecah-belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia perkuatan (enforcement) yang cukup.

Yang jauh lebih merepotkan adalah, bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata). Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang, katakanlah, telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya.

Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan (calculated effect), yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain (systematic effect). Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi (intended effect). Anarki oleh kelompok terorganisir ini umumnya terencana, memiliki cukup kekuatan dan jaringan, memiliki motif tertentu dan juga target-target tertentu.

9. Ketidakpercayaan pada hukum

Sering dikatakan, tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan polisi, ketegasan jaksa serta keadilan hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa sekaligus hakimnya misalnya dengan tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrichting*).

Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakkan hukum, polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

Tokoh utama kaum anarkisme adalah Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin kelompok anarkis dalam konverensi besar kaum Sosialis sedunia dan terlibat pertengkar dan perdebatan besar dengan Marx yang menganut ajaran Marxisme yang mempunyai tiga ideologi besar yaitu Komunisme, Sosialisme Demokrat, dan Neomarxisme. Bakunin akhirnya dikeluarkan dari kelompok Marxis mainstream dan perjuangan kaum anarkis dianggap bukan sebagai perjuangan kaum sosialis.

Sejak Bakunin, anarkisme identik dengan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan pembunuhan sebagai basis perjuangan mereka. Pembunuhan kepala negara, pemboman atas gedung-gedung milik negara, dan perbuatan teroris lainnya dibenarkan oleh anarkisme sebagai cara untuk menggerakkan massa untuk memberontak.

Mikhail Bakunin merupakan seorang tokoh anarkis yang mempunyai energi revolusi yang dahsyat. Bakunin merupakan ‘penganut’ ajaran Proudhon, tetapi mengembangkannya ke bidang ekonomi ketika dia dan sayap kolektivisme dalam First International mengakui hak milik kolektif atas tanah dan alat-alat produksi dan ingin membatasi kekayaan pribadi kepada hasil kerja seseorang.¹⁷

Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat yaitu berupa Undang-Undang No. 9 Th. 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Tetapi kelihatanya aturan tersebut kurang di mengerti atau mungkin kurang sampai di masyarakat, sehingga masyarakat terlalu sering bertindak di luar aturan tersebut. Atau mungkin bisa juga aturan tersebut kurang mengikat atau kurang bisa dijadikan landasan untuk mengatur suatu permasalahan tersebut dan perlu untuk diperbaharui. Karena selama ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur masalah demonstrasi anrkis ini berikut sanksi yang tegas. Padahal kejadian atau fenomena ini sudah

¹⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan, terakhir diakses pada tanggal 2 Februari 2012,Kamis,20.00

menjadi tradisi di era masyarakat sekarang ini. Pemerintah masih menggunakan KUHP untuk menghukum peserta demo yang bersifat anarkis ini. Mungkin pemerintah harus merevisi Undang-Undang yang lama agar kejadian seperti ini bisa cepat ditanggulangi dan ada aturan yang jelas dan spesifik untuk menghukum para pelakunya.

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹⁸

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif yang dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 38

¹⁹ Suryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1

hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

1.6.2 Data

1. Sumber bahan hukum primer

Yaitu suatu data yang di peroleh langsung dari lapangan yaitu Polres Mojokerto Kota.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri di bagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang yang mengatur atau berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas. Dalam permasalahan ini yang digunakan adalah UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa referensi dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang pidana dan kekerasan untuk digunakan dalam membuat konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa jurnal hukum.²⁰

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Primer yaitu berupa data yang diambil dengan cara observasi, wawancara dengan anggota Kepolisian Polres Mojokerto Kota atau kuisisioner
2. Sekunder yaitu berupa data yang diambil dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan

²⁰ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hal .113

formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten dalam bidang Anarkisme.²¹

1.6.4 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu gambaran yang terjadi dalam suatu masalah dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan undang-undang terkait dengan Demonstrasi yang bersifat anarkis yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis” ini terbagi dalam empat bab, dan untuk lebih memudahkan maka penulis akan memberikan gambaran umum dari tiap-tiap bab nya.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang bersifat uraian pokok-pokok dari penulisan skripsi atau tulisan yang harus dikembangkan. Didalam Bab pertama ini mengulas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

²¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hal .113

Bab Kedua pada skripsi ini mengulas tentang pengaturan demonstrasi yang ada di Indonesia. Dalam Bab dua ini terdiri dari 2 Sub Bab. Sub bab pertama mengulas tentang bentuk-bentuk dan tata cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan pada Sub Bab kedua, mengulas tentang relevansi atau kelemahan dari UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bab Ketiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Pada Bab ketiga ini terdiri dari dua Sub Bab. Sub Bab pertama yaitu mengulas tentang bentuk pertanggungjawaban menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan pada Sub Bab kedua akan mengulas tentang penerapan sanksi yang akan di terima oleh pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis

Bab Keempat merupakan bab penutup yang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan pada skripsi ini serta berisi saran dari penulisan yang nantinya mungkin dapat berguna bagi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan demonstrasi.